

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Asy'ari, Hasyim. *Dinamika Negara Hukum, Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*, (2019).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Fadjar, Muktie, A. *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Penerbitan Banyumedia Publishing, 2005).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Depok; Rajawali Pers, 2020).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- _____. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta; Gama Media, 1999).
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2006).

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung; Alumni, 2018).

Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen), 1997).

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

_____. *Ilmu Hukum*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Shaw, Malcolm. N. *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Jasagrafindo Persada, 2011).

Susilo, Wahyu. *Migran dan Negara: Politik Perlindungan Buruh Migran Indonesia* (Jakarta: Migrant CARE, 2019).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press 2018).

Thaib, Dahan. *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Negara dan Hukum Kwarganegaraan Indonesia*, (Kencana, Jakarta. 2019).

Wantu, Fence. M. *Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia*, (Gorontalo, 2015).

Artikel Jurnal

Adnan, L. O, Dewi, Salam, Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, *Journal of Human and Aducation*, Vol. 4, No. 1, (2024): 121

- Ahmad Jazuli, Prinsip Negara Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, (2021): 412
- Amsori Fransiscus Lature, “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 2588–93.
- Baskro, Mahammad Farrel Aryantaputra, and Waluyo, Perlindungan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Ditetapkan Sebagai Terpidana Tipikor Dalam Menjalankan Printah Atasan (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, Innovative, *Journal Of Social Sciemce Research*, Vol. 5, No. 4: 9185
- Dea Linta Arlianti, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahakamah Konstitusi, *Mulawarman Law Review*, (2022): 49
- Hach Dhini Sekarwangi, Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf), *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1723, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15240>.
- I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri,” *Yustisia Jurnal Hukum* 21, no. 2 (2025): 59–68.
- I. Dewa Gede Palguna, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *Udayana Master Law Jurnal*, Vol. 10, No. 3, (2021): 495
- Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2021): 87–100, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114/11433>
- Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, “Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 53–67, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>.
- Leonard Hutabarat et al., “Penerapan Portal PEDULI WNI Dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri,” *JURNAL Comunit  Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): 887–95, <https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.4126>.

- M. Fakhrian Nadrianto dkk, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Produk Legalisasi di Indonesia, *Ibtikar*, Vol. 2, No. 2, Desember (2025): 102
- M. Faizal Salam, Perlindungan Diplomatik dan Konsuler terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2020): 95
- Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961”, *Jurnal Perspektif FH Wijaya Kusuma*, Volume XV No. 3, (2010): 43
- Marzuqoh Aulia and Nur Azizah, “Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen Di Malaysia Tahun 2022–2023,” *Jayapangus Press* 7, no. 1 (2024): 167–86.
- Miracle Arthur Koraag and Ali Ahmad, “Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective,” *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 454–76, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum>.
- Morenna Thasya Sumolang, “Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler,” *Lex Et Societatis* 4, no. 3 (2018): 147–53.
- Muhamad Rizky Purnama, Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional, *Jurnal Recht*, Vol. 2, No. 3: 23
- Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- Natalia dkk, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Nakula Pusat Ilmu Pendidikan Bahasa dan Ilmu Hukum Internasional*, Vol 2, No. 4, (2024): 194
- Natalia, Pipit, et al, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Nakula Pusat Ilmu Pendidikan Bahasa dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 4, (2024): 194
- Paramitaningrum, et al., “Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di

Luar Negeri”, *Global & Strategis* 12, No. 1, (2018) 17–37, <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/5234/4829>

Pipit Natalia et al., “Perlindungan Warga Negara Indoneisa Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional Universitas Jambi A . Perlindungan Warga Negara (Pekerja Migran) Di Luar Negeri Signifikan Adalah Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran,” *Jurnal Nakula* 2, no. 4 (2024); 194–200.

Salaki, P. A, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, *Lex Privantum*, Vol 9, No. 11, (2022): 9

Sefriani, Fungsi Konsuler dalam Perlindungan Warga Negara Menurut Konvensi Wina 1963, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 2, (2017): 278

Vensy Eli Maria Tabita, Devy K. G. Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga, “Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional,” *JURNAL HUKUM : SUMBER HUKUM* 4, no. 4 (2006): 650–54.

Vensy Eli Maria Tabita, Devy K.G. Sondakh, dan Thor Bangsaradja Sinaga, Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional, *Lex Administration*, Vol 12, No. 3, (2024): 43

Vensy Eli Maria, et all, Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional, *Lex Administratum* 12, No.3, (2024): 2.

Vensy Eli Maria, et all, Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional, *Lex Administratum* 12, No.3, (2024): 6

Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4, (2016), hlm. 708, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1341/281>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sumber Internet

28 WNI Korban TPPO Online Scamming di Kamboja Dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI Phnom Penh (2023). <https://www.antaranews.com/berita/3757977/pemerintah-pulangkan-28-wni-korban-tpo-dari-kamboja>. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul. 13.50 WIB.

Dibrangkatkan Calo Ke Arab Saudi, BP2MI Laporkan Kasus PMI Fujiyanti, pada Kepolisian, <https://kp2mi.go.id/index.php/berita-detail/dibrangkatkan-calo-ke-arab-saudi-bp2mi-laporkan-kasus-pmi-fujiyanti-pada-kepolisian>. Diakses Pada 9 April 2026, Pukul. 09.00 WIB

Harkomoyo, H. 2023, November 2. No. 128/11/2023/FPT (Lampiran I: Daftar Pertanyaan dan Jawaban No. 46091/PK/10/2023/66). (V. E. Tabita, Pewawancara)

Haryono, W., 2014. “5 Payung Hukum Perlindungan WNI di Negeri”, Medcom.id. <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxBnBqk-5-payung-hukumperlindungan-wni-di-luar-negeri>. Diakses Pada 7 April 2026, Pukul 13.00 WIB.

Husnul Abdi, 2021. “4 Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang Wajib Dipahami, dari Perlindungan hingga Perdamaian”, Liputan6.com, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4659983/4-tujuan-nasional-bangsa-indonesia-yang-wajibdipahami-dari-perlindungan-hingga-perdamaian?page=2>diakses. Diakses Pada 7 April 2026, Pukul 12.00 WIB.

Kasus Siti Aisyah, WNI Terdakwa Pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia Berakhir dengan Pencabutan Dakwaan, 2017-2019 <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2198-pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah>. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul. 13.40 WIB.

Kasus WNI Jadi Pekerja Online Scam Melonjak, Apa Sebabnya Menurut Pakar, https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/27/093000965/kasus-wni-jadi-pekerja-online-scam-melonjak-apa-sebabnya-menurut-pakar?page=all&utm_source=chatgpt.com. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul 13.00 WIB.

Kemenlu RI. WNI dibebaskan dari hukuman mati di Arab Saudi, 2009- 2024. <https://www.idntimes.com/news/world/kemlu-bebaskan-wni-dari-ancaman-hukuman-mati-arab-saudi-00-9h6p4-rs20h9>. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul 13.30 WIB.

Kemlu RI Beber Ribuan WNI Sengaja Pilih Jadi 'Scammer' di Luar Negeri, *cnnindonesia.com*, diakses 11 November 2025, [Kemlu RI Beber Ribuan WNI Sengaja Pilih Jadi 'Scammer' di Luar Negeri. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul 15.00 WIB.](#)

Optimalkan Perlindungan, KDEI Taipei Pelopori Pendataan PMI Profesional di Taiwan, <https://www.kdei-taipei.org/news/optimalkan-perlindungan-kdei-taipei-pelopori-pendataan-pmi-profesional-di-taiwan-2615.html>. Diakses Pada 9 April, 2026, Pukul 10.00 WIB.

Pemerintah Indonesia Protes Keras Arab Saudi Atas Eksekusi Mati Siti Zainab, https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_indonesia_protes_keras_arab_saudi_atas_eksekusi_mati_siti_zainab. Diakses Pada 9 April 2026, Pukul 10.00 WIB.

Ribuan WNI/PMI dideportasi dari Malaysia tahun 2023 <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/01/196-pmi-ilegal-dipulangkan-dari-malaysia-via-dumai-riau-ada-yang-sakit-hingga-lagi-hamil>. Diakses Pada 22 April 2026, Pukul. 14.00 WIB